



Implementasi Cash Management System Bank Jateng Pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tahun 2025 Studi Kasus Di: Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Belinda Puspa Arum^{1*}, Susilaningtyas Budiana Kurniawati², Supartini³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Korespondensi penulis: belinda.setyoatmo@gmail.com

Abstract. *This research examines the implementation of Bank Jateng's Cash Management System (CMS) among sub-district expenditure treasurers in Wonogiri Regency in 2025, highlighting the role of digital financial literacy as a determinant of successful fintech adoption in rural areas. The study is grounded in local government efforts to promote non-cash transactions to enhance efficiency and transparency in financial management, despite ongoing challenges regarding digital literacy among sub-district treasurers. The objective is to analyze the CMS implementation process, feature utilization levels, and the influence of digital financial literacy on technology adoption. Using a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews with 10 informants (sub-district treasurers, Bank Jateng employees, and BPKD officials), direct observation, and document analysis. Data were processed thematically using NVivo software to generate visualizations such as word clouds, hierarchy charts, and project maps. Findings indicate that CMS implementation is progressing steadily, with optimal use of basic features such as real-time balance monitoring, inter-account transfers, and non-cash payments; however, advanced feature optimization reached only 45–50% due to a lingering reliance on manual transactions and resistance from third-party partners. Treasurers' perceptions of digital financial literacy are relatively positive, particularly regarding system security (scoring 5/5) due to OTPs, tokens, and multi-layered approval mechanisms, although perceptions are influenced by senior age (>45 years) and non-technical backgrounds. Primary supporting factors include user-friendly features, guaranteed security, adaptive treasurer attitudes, routine socialization/training, and binding regulations. Conversely, dominant inhibitors include application glitches, unstable internet connectivity, limited human resources, and geographical constraints. The implications of this study emphasize the need for strengthening digital financial literacy through continuous training and infrastructure improvements to ensure optimal CMS implementation at the rural sub-district level.*

Keywords: Cash Management System; Digital Financial Literacy; Non-Cash Transactions.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi Cash Management System (CMS) Bank Jateng pada bendahara pengeluaran kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2025, dengan menyoroti peran literasi keuangan digital sebagai faktor penentu keberhasilan adopsi teknologi keuangan di wilayah pedesaan. Latar belakang penelitian didasari pada upaya pemerintah daerah untuk mendorong transaksi nontunai guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan, namun masih dihadapkan pada tantangan literasi digital di kalangan bendahara kecamatan. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses implementasi CMS, tingkat pemanfaatan fitur, serta pengaruh literasi keuangan digital terhadap adopsi teknologi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 10 informan (bendahara kecamatan, pegawai Bank Jateng, dan BPKD), observasi langsung, serta analisis dokumen. Data diolah secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo untuk menghasilkan visualisasi seperti word cloud, hierarchy chart, dan project map. Temuan menunjukkan bahwa implementasi CMS berlangsung secara progresif dengan pemanfaatan optimal fitur dasar seperti pemantauan saldo real-time, transfer antar rekening, dan pembayaran nontunai, namun optimalisasi fitur lanjutan hanya mencapai 45–50% karena ketergantungan pada transaksi manual dan resistensi rekanan pihak ketiga. Persepsi bendahara terhadap literasi keuangan digital relatif positif, terutama dalam aspek keamanan sistem (skor 5/5) berkat OTP, token, dan mekanisme persetujuan berlapis, meskipun dipengaruhi oleh usia senior (>45 tahun) dan latar belakang nonteknologi. Faktor pendukung utama meliputi kemudahan fitur, keamanan terjamin, sikap adaptif bendahara, sosialisasi serta pelatihan rutin, dan regulasi yang mengikat. Sebaliknya, penghambat dominan adalah gangguan teknis aplikasi, jaringan internet tidak stabil, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala geografis. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan literasi keuangan digital melalui pelatihan berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur agar implementasi CMS dapat optimal di tingkat kecamatan pedesaan.

Kata kunci: Cash Management System; Literasi Keuangan Digital; Transaksi Nontunai.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menerapkan aplikasi dan infrastruktur elektronik dalam tata kelola pemerintahan. SPBE bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel, disertai pelayanan publik berkualitas dan terpercaya. Di tingkat daerah, implementasi SPBE salah satunya melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), termasuk penggunaan sistem pembayaran nontunai seperti Cash Management System (CMS). Di Provinsi Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng) ditunjuk sebagai mitra utama dalam penyediaan layanan CMS bagi satuan kerja pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.

CMS Bank Jateng merupakan platform digital yang memfasilitasi bendahara untuk melakukan pemantauan saldo real-time, transfer antar rekening, rekonsiliasi otomatis, dan pembayaran elektronik tanpa kunjungan fisik ke bank. Sistem ini telah digulirkan secara masif sejak 2020 dan dipercepat pada 2024–2025 melalui berbagai workshop serta capacity building di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah. Di Kabupaten Wonogiri, Bank Jateng Cabang Wonogiri mendukung percepatan ini melalui kegiatan seperti Workshop Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka ETPD tahun 2025, termasuk pelatihan khusus bagi bendahara kecamatan. Meskipun regulasi dan infrastruktur mendukung, tingkat pemanfaatan CMS oleh bendahara kecamatan di Wonogiri masih belum optimal, dengan optimalisasi fitur lanjutan hanya sekitar 45–50% berdasarkan data awal 2025, sementara sebagian besar masih bergantung pada transaksi manual.

Literasi keuangan digital menjadi faktor kunci dalam keberhasilan adopsi teknologi keuangan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46%, naik dari 65,43% pada 2024, dengan indeks inklusi keuangan 80,51%.

Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara perkotaan dan pedesaan, di mana literasi keuangan digital cenderung lebih rendah di kalangan aparatur pedesaan akibat keterbatasan akses dan kebiasaan dengan fitur keamanan seperti OTP serta token. Di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Wonogiri yang mayoritas wilayahnya pedesaan dengan bendahara berusia senior (>45 tahun) dan latar belakang nonteknologi, rendahnya literasi ini menyebabkan resistensi, ketakutan salah penggunaan, serta under-utilization fitur CMS.

Secara nasional, pemanfaatan transaksi non-tunai telah menjadi prioritas melalui Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) sejak 2014 dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dari Bank Indonesia, yang menargetkan inklusi keuangan luas. Instrumen seperti QRIS mencatat pertumbuhan pesat sepanjang 2025, dengan volume transaksi meningkat sekitar 140% year-on-year, jumlah pengguna mencapai lebih dari 59 juta, dan merchant melampaui 42 juta (mayoritas UMKM). Meskipun demikian, tantangan tetap ada berupa ketimpangan akses digital, literasi keuangan yang masih moderat, serta risiko keamanan data, terutama di daerah pedesaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi CMS di berbagai konteks pemerintah daerah. Misalnya, Anindita & Santoso (2022) menemukan bahwa CMS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sesuai regulasi transaksi nontunai, dengan mekanisme maker-checker-approval yang meningkatkan keamanan dan akuntabilitas. Ardunan, Nasution, & Seswandi (2026) menyatakan CMS berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi melalui pengendalian internal serta pelaporan real-time. Safadila (2024) menyoroti efektivitas CMS di KPU Kabupaten Jember melalui kemudahan akses, pengendalian arus kas, dan pembagian kewenangan bertahap. Namun, penelitian-penelitian tersebut mayoritas berfokus pada organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat kabupaten/kota, bukan pada tingkat kecamatan di daerah pedesaan yang memiliki tantangan unik seperti infrastruktur internet tidak stabil, demografi aparatur senior, dan resistensi rekanan pihak ketiga.

Meskipun pemerintah pusat, daerah, Bank Jateng, serta OJK telah melakukan upaya intensif melalui regulasi, pelatihan rutin, capacity building, dan sosialisasi—termasuk Program Nasional Literasi Keuangan Digital 2024–2027 serta Surat Edaran Bupati Wonogiri tentang kewajiban penggunaan CMS—tingkat pemanfaatan fitur lanjutan CMS di kecamatan Wonogiri masih di bawah 50%. Kondisi ini menunjukkan gap implementasi

signifikan antara kebijakan nasional dan realitas lapangan di tingkat kecamatan pedesaan, di mana keterbatasan sumber daya manusia dan geografis menghambat optimalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan dalam mengkaji secara mendalam peran literasi keuangan digital sebagai faktor penentu adopsi CMS pada bendahara pengeluaran kecamatan di Kabupaten Wonogiri menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kontekstual yang lebih tajam serta rekomendasi tepat sasaran bagi pemangku kepentingan untuk mempercepat inklusi keuangan daerah dan transparansi pengelolaan APBD kecamatan.

2. KAJIAN TEORITIS

Literasi keuangan digital dalam konteks pemerintahan menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di era disrupsi teknologi. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan literasi keuangan digital sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan melalui penggunaan teknologi digital. Dalam sektor publik, definisi ini bergeser dari kesejahteraan individu menjadi efisiensi institusional dalam mengelola dana publik, dengan empat dimensi utama: pengetahuan dasar produk keuangan digital, kemampuan pengelolaan keuangan institusi melalui platform digital, pemahaman risiko perlindungan data, serta pemahaman fitur keamanan teknis seperti OTP dan enkripsi data. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, naik dari 65,43 persen pada 2024, dengan indeks inklusi keuangan 80,51 persen, meskipun kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan utama dalam standarisasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara digital. Rendahnya literasi di level birokrasi sering memicu resistensi terhadap teknologi baru dan ketergantungan pada prosedur manual yang rentan manipulasi, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Lusardi dan Mitchell yang menunjukkan peningkatan literasi keuangan digital secara signifikan mendorong adopsi teknologi keuangan di negara berkembang. Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata bagi bendahara di tingkat kecamatan dengan usia senior, sehingga program pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk menutup celah kompetensi digital.

Secara fundamental, literasi keuangan digital menggabungkan prinsip keuangan publik konvensional dengan kecakapan teknologi informasi. Humaira dan Hamdani menekankan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan dan keyakinan yang memengaruhi perilaku individu dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan, yang dalam sektor publik berdampak langsung pada ketepatan penyerapan anggaran dan minimalisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang tidak produktif. Individu literat di lingkungan pemerintahan tidak hanya menjalankan aplikasi sistem informasi keuangan, tetapi juga memahami implikasi legal dan administratif dari setiap transaksi virtual. Peter Sina mempertegas integrasi antara kecerdasan finansial dan kemampuan mengevaluasi validitas informasi digital, yang krusial bagi pegawai pemerintahan untuk memilah data akurat di tengah arus informasi cepat dan menghindari skema kejahatan siber menyasar rekening kas daerah. Mahardika Pradana mengkaji bahwa pertumbuhan teknologi finansial harus diimbangi pemahaman mekanisme keamanan aplikasi pembayaran, relevan dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Cash Management System yang memerlukan pemahaman teknis tinggi, termasuk kesadaran biaya administrasi, efisiensi waktu, serta verifikasi legalitas mitra perbankan.

Siti Amanah menjelaskan bahwa literasi keuangan digital memerlukan parameter spesifik melampaui literasi tradisional, mencakup pengetahuan tentang nilai waktu uang yang berkaitan dengan percepatan realisasi anggaran di platform pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kemampuan analisis biaya-manfaat terhadap instrumen pembayaran elektronik. Aspek rasionalitas birokrasi disoroti Lulup Endah Yushita, di mana literasi keuangan erat dengan pengambilan keputusan bijak, mencegah pemborosan di bawah tekanan penyerapan anggaran cepat. Keamanan data publik menjadi pilar, sebagaimana ditekankan Indra Rahayu, dengan pemahaman proteksi akun dan prosedur keamanan ganda sebagai kewajiban bendahara untuk mencegah peretasan. Kholilah dan Iramani menyatakan faktor sikap dan perilaku memengaruhi penerapan pengetahuan keuangan, mendorong manajemen disiplin seperti rekonsiliasi harian transaksi digital. Dwi Setiawan memaparkan peran pendidikan dan pelatihan formal sebagai kunci peningkatan literasi di pemerintahan, dengan integrasi pelatihan berkala dan kolaborasi lintas instansi untuk ekosistem pembayaran nontunai.

Transaksi nontunai, menurut Bank Indonesia, adalah mekanisme pembayaran tanpa uang fisik melalui instrumen berbasis warkat atau elektronik. Dalam pemerintahan,

melalui kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia mendorong alih transaksi belanja dan pendapatan ke digital untuk efisiensi, keamanan, dan transparansi, dengan instrumen seperti Cash Management System dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang meminimalkan risiko kehilangan atau pemalsuan uang. Data Bank Indonesia menunjukkan volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,66 miliar pada November 2025, tumbuh 41,12 persen secara tahunan, dengan prediksi tahun penuh 34,1 persen, didukung pertumbuhan QRIS hingga 143,64 persen year-on-year. Mudrajad Kuncoro menjelaskan implementasi nontunai meningkatkan efisiensi ekonomi melalui pengurangan biaya transaksi dan percepatan perputaran dana, terlihat dari singkatnya proses pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekanan, krusial untuk menghindari penumpukan penyerapan anggaran akhir tahun. Dali, Awati, dan Fiskal menekankan korelasi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui jejak audit permanen, menekan pungutan liar dan pencegahan korupsi.

Sari menyoroti faktor kemudahan dan kemanfaatan dalam adopsi, di mana persepsi aparaturnya terhadap keandalan sistem menentukan tingkat penggunaan, meskipun hambatan muncul pada aparaturnya senior. Marihot Pahala Siahaan berpendapat elektronifikasi penerimaan meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui kanal seperti QRIS, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup kebocoran dana manual. Rahman menyoroti kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan melalui validitas data dan rekonsiliasi otomatis, memudahkan audit. Indra menyatakan keamanan informasi sebagai pilar dengan protokol tinggi seperti enkripsi dan otentikasi ganda, vital untuk dana publik besar. Dwi Setiawan memaparkan ketersediaan infrastruktur teknologi merata sebagai syarat, terutama di daerah terpencil, dengan sinergi pemerintah untuk membangun jaringan stabil.

Kajian ini memberikan landasan bagi penelitian mengenai implementasi Cash Management System Bank Jateng pada bendahara kecamatan di Kabupaten Wonogiri, di mana literasi keuangan digital berperan sebagai faktor kunci adopsi teknologi nontunai di wilayah pedesaan. Dengan update terkini seperti dukungan Bank Jateng dalam program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta penghargaan atas kontribusi desa pada 2026, penelitian ini mengisi gap dengan fokus pada persepsi dan tantangan kontekstual bendahara, implisit menyiratkan bahwa peningkatan literasi akan mempercepat optimalisasi fitur CMS dan transparansi keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam implementasi Cash Management System (CMS) Bank Jateng pada bendahara pengeluaran kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2025, khususnya peran literasi keuangan digital sebagai faktor kunci adopsi teknologi keuangan di wilayah pedesaan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks nyata dari perspektif partisipan, sementara desain studi kasus diterapkan pada satu bounded system, yaitu implementasi CMS di seluruh 25 kecamatan Kabupaten Wonogiri beserta pihak terkait dari Bank Jateng Cabang Wonogiri dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri. Rancangan ini memungkinkan analisis holistik yang menghasilkan temuan kontekstual kaya serta rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan.

Lokasi penelitian difokuskan pada Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup seluruh 25 kecamatan sebagai objek utama untuk merepresentasikan variasi tingkat adopsi CMS, dari kecamatan dengan akses internet memadai hingga wilayah terpencil. Pengumpulan data dilaksanakan di kantor kecamatan masing-masing, Kantor Bank Jateng Cabang Wonogiri, serta Kantor BPKD Kabupaten Wonogiri. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada upaya intensif Pemkab Wonogiri dalam mempercepat digitalisasi keuangan melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di mana Kabupaten Wonogiri mencapai nilai 96,8% pada pelaporan Indeks ETPD Semester I 2025 serta terus meningkatkan implementasi instrumen non-tunai seperti CMS dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Lokasi ini juga strategis bagi peneliti karena kedekatannya dengan wilayah Solo Raya.

Populasi penelitian mencakup seluruh 25 bendahara pengeluaran kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang menggunakan CMS Bank Jateng, ditambah narasumber kunci dari Bank Jateng Cabang Wonogiri dan BPKD Kabupaten Wonogiri. Mengingat populasi bendahara terbatas (satu per kecamatan), teknik sensus diterapkan untuk cakupan data lengkap terhadap populasi utama. Namun, untuk wawancara mendalam, purposive sampling digunakan dalam pemilihan 10 informan hingga mencapai saturasi data. Kriteria pemilihan bendahara meliputi representasi kecamatan dengan tingkat penggunaan CMS tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan data Bank Jateng 2025, serta

minimal satu tahun pengalaman jabatan. Narasumber dari Bank Jateng dan BPKD dipilih karena peran langsung dalam sosialisasi, pelatihan, dan monitoring CMS, termasuk kegiatan workshop capacity building bendahara pada November 2025 dan evaluasi TP2DD terkini.

Teknik pengumpulan data melibatkan triangulasi untuk memperoleh data yang saling melengkapi dan valid. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan secara tatap muka atau daring dengan durasi 45–90 menit per informan untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan tantangan. Kedua, observasi partisipatif melibatkan pengamatan langsung proses penggunaan CMS di kantor kecamatan guna menangkap praktik aktual. Ketiga, studi dokumen mencakup analisis laporan penggunaan CMS per kecamatan, sertifikat pelatihan, dokumen kebijakan dari Bank Jateng dan BPKD, serta data terkait seperti laporan Indeks ETPD dan hasil workshop TP2DD. Instrumen pengumpulan data berupa panduan wawancara, lembar observasi, dan checklist dokumen, yang telah divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode, menghasilkan instrumen yang reliabel dan valid untuk konteks penelitian.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga tahap utama: kondensasi data (data condensation) melalui coding tematik menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mereduksi dan mengorganisir data; penyajian data (data display) dalam bentuk matriks, narasi, diagram, word cloud, hierarchy chart, serta project map; dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing/verification) secara iteratif dengan referensi kembali ke data lapangan hingga saturasi tercapai. Triangulasi sumber, metode, dan teori diterapkan untuk memastikan keabsahan temuan. Model penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif tanpa rumus statistik parametrik, sehingga tidak memerlukan pengujian hipotesis formal, melainkan fokus pada pemahaman mendalam peran literasi keuangan digital dalam implementasi CMS, yang secara implisit menunjukkan potensi peningkatan adopsi melalui penguatan literasi dan infrastruktur di tingkat kecamatan pedesaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup seluruh 25 kecamatan sebagai objek utama, dengan pengumpulan data di kantor kecamatan masing-masing, Kantor Bank Jateng Cabang Wonogiri, serta Kantor

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri. Rentang waktu penelitian berlangsung dari November hingga Desember 2025, di mana implementasi Cash Management System (CMS) Bank Jateng telah menjadi wajib sejak awal tahun tersebut, seiring dengan percepatan transaksi non-tunai melalui program seperti Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Proses pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 10 informan (delapan bendahara kecamatan, satu pegawai Bank Jateng, dan satu pejabat BPKD), observasi partisipatif terhadap penggunaan CMS di kantor kecamatan, serta analisis dokumen seperti laporan penggunaan CMS per kecamatan, sertifikat pelatihan, dan dokumen kebijakan terkait. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo untuk menghasilkan visualisasi seperti word cloud, hierarchy chart, dan project map, dengan triangulasi sumber, metode, dan teori untuk memastikan keabsahan.

Kabupaten Wonogiri, sebagai wilayah pedesaan dengan mayoritas kecamatan berbasis pegunungan, menunjukkan variasi implementasi CMS: kecamatan dekat pusat kota seperti Wonogiri dan Selogiri mencapai 80–100% penggunaan, sementara kecamatan terpencil seperti Pracimantoro dan Giritontro masih di bawah 30%, meskipun terdapat pengecualian seperti Kecamatan Puhpelem dengan tingkat transaksi non-tunai tertinggi berkat adaptasi lokal. Data internal Bank Jateng Cabang Wonogiri per November–Desember 2025 mengonfirmasi gap ini, dipengaruhi oleh infrastruktur jaringan dan literasi keuangan digital bendahara. Tabel 4.1 merangkum profil delapan bendahara yang diwawancarai, mewakili spektrum usia (28–56 tahun), pendidikan (SMA hingga S1), dan masa jabatan (2–6 tahun), yang mencerminkan demografi pengguna CMS di kecamatan pedesaan.

Implementasi CMS Bank Jateng

Hasil wawancara menunjukkan proses implementasi CMS berbasis website (gibs.bankjateng.co.id) melibatkan pendaftaran akun (operator, checker, eksekutor) di awal tahun atau saat pergantian pejabat, diikuti pemrosesan transaksi dengan tiga lapis verifikasi untuk keamanan. Pegawai Bank Jateng menjelaskan bahwa struktur ini meminimalkan kesalahan dan fraud, dengan OTP dan PIN sebagai fitur keamanan utama. Observasi partisipatif mengonfirmasi pemanfaatan fitur dasar seperti pemantauan saldo real-time dan transfer nontunai, meskipun fitur lanjutan seperti rekonsiliasi otomatis

hanya dimanfaatkan 45–50% kecamatan karena ketergantungan manual. Analisis dokumen laporan Bank Jateng 2025 memperkuat temuan ini, dengan peningkatan transaksi non-tunai melalui integrasi QRIS dan KKPD.

Analisis NVivo menghasilkan visualisasi yang mendukung temuan. Gambar 4.1 (Project Map Implementasi CMS) menggambarkan hubungan hierarkis antara pendaftaran akun dan pemrosesan transaksi, dengan subtema operator-checker-eksekutor sebagai elemen kunci. Gambar 4.2 (Word Cloud Implementasi CMS) menonjolkan kata "akun", "pembayaran", "operator", "checker", dan "eksekutor", menandakan fokus pada keamanan berlapis. Gambar 4.3 (Hierarchy Chart Implementasi CMS) menunjukkan pemrosesan transaksi sebagai proporsi terbesar (60%), diikuti pendaftaran akun (40%), mengonfirmasi proses runtut yang mendukung efisiensi.

Faktor Pendukung CMS Bank Jateng

Faktor pendukung dominan mencakup regulasi mengikat (Peraturan Bupati tentang transaksi nontunai), sosialisasi/pelatihan rutin (setahun sekali oleh Bank Jateng dan BPKD), sikap adaptif bendahara (kemauan belajar meskipun usia senior), serta fitur CMS yang memudahkan dan aman (skor persepsi keamanan 5/5). Wawancara mengungkap apresiasi terhadap capacity building, yang mencakup evaluasi kinerja dan reward OPD berprestasi. Gambar 4.4 (Hierarchy Chart Faktor Pendukung) menunjukkan fitur/keamanan sebagai proporsi terbesar (40%), diikuti latar belakang pengguna (30%). Gambar 4.5 (Word Cloud Faktor Pendukung) menonjolkan "fitur", "menggunakan", "pembayaran", dan "belajar". Gambar 4.6 (Project Map Faktor Pendukung) mengilustrasikan keterkaitan empat subtema, menegaskan dukungan holistik.

Faktor Penghambat CMS Bank Jateng

Penghambat utama meliputi teknis CMS (batas waktu transaksi), jaringan internet tidak stabil, SDM terbatas (pegawai baru dan rekanan tolak nontunai), serta lokasi geografis. Wawancara menyoroti resistensi rekanan pihak ketiga di kecamatan terpencil. Gambar 4.7 (Hierarchy Chart Faktor Penghambat) menunjukkan teknis CMS dan jaringan sebagai proporsi dominan (50%). Gambar 4.8 (Word Cloud Faktor Penghambat) menonjolkan "jaringan", "error", dan "mekanisme". Gambar 4.9 (Project Map Faktor Penghambat) menggambarkan hubungan subtema, menekankan kendala infrastruktur pedesaan.

B. Pembahasan

Hasil menunjukkan implementasi CMS progresif, sejalan dengan teori literasi keuangan digital OJK (2024) yang menekankan dimensi pengetahuan dan keamanan untuk efisiensi, meskipun gap literasi perdesaan (59,25%) menyebabkan under-utilization. Ini sesuai penelitian Anindita & Santoso (2022) tentang struktur user aman, tapi bertentangan dengan Ardunan et al. (2026) di mana real-time reporting optimal; di Wonogiri, hambatan infrastruktur menurunkan akuntabilitas. Faktor pendukung seperti pelatihan mendukung Lusardi & Mitchell (2023), sementara penghambat jaringan selaras Dwi Setiawan (2020). Implikasi teoritis: memperkaya model TAM dengan konteks pedesaan, di mana literasi naik 1,03% nasional pada 2025. Pemkab Wonogiri perlu perkuat infrastruktur dan pelatihan, seperti UMKM Go-Digital untuk rekanan, serta integrasi smart governance untuk efisiensi keuangan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Cash Management System (CMS) Bank Jateng pada bendahara pengeluaran kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2025 telah berlangsung secara progresif, ditandai dengan pemanfaatan fitur utama seperti pemantauan saldo real-time, cek mutasi rekening, transfer antar rekening, dan pembayaran nontunai melalui Virtual Account serta tagihan rutin, termasuk transaksi belanja rapat via aplikasi Tisera. Namun, optimalisasi fitur lanjutan hanya mencapai sekitar 45–50% di sebagian kecamatan, dengan sebagian bendahara masih bergantung pada fitur dasar atau transaksi manual akibat kendala adaptasi dan resistensi rekanan pihak ketiga. Persepsi bendahara terhadap literasi keuangan digital secara umum positif, dengan penilaian keamanan sistem mencapai skala 5 dari 5 berkat fitur OTP, token, persetujuan berlapis (operator-checker-eksekutor), serta pemblokiran otomatis akun tidak aktif; manfaat yang dirasakan meliputi kemudahan transaksi, transparansi, pengurangan risiko membawa uang tunai, dan efisiensi waktu. Meskipun demikian, literasi keuangan digital tetap dipengaruhi oleh kemauan belajar individu, di mana usia dan latar belakang pendidikan tidak menjadi penghalang utama selama ada niat adaptasi dan dukungan pelatihan.

Faktor pendukung utama implementasi CMS meliputi banyaknya fitur yang memudahkan beserta tingkat keamanan yang terjamin, sikap adaptif serta kemauan belajar bendahara, sosialisasi dan pelatihan rutin (capacity building) oleh Bank Jateng dan BPKD setidaknya sekali setahun, serta regulasi mengikat seperti Surat Edaran Bupati dan kebijakan ETPD. Sebaliknya, faktor penghambat dominan terdiri atas permasalahan

teknis aplikasi (batas waktu penyelesaian transaksi yang ketat dan gangguan sistem sesekali), kualitas jaringan internet tidak stabil terutama di wilayah pegunungan, keterbatasan sumber daya manusia (pegawai baru minim transfer knowledge dan rekanan/pihak ketiga yang masih menolak pembayaran nontunai), serta lokasi geografis yang mempersulit akses fasilitasi langsung. Secara keseluruhan, peran literasi keuangan digital terbukti sebagai faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan adopsi CMS di tingkat kecamatan pedesaan, di mana peningkatan literasi melalui pendekatan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan manual dan mempercepat inklusi keuangan daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan BPKD untuk meningkatkan frekuensi serta kualitas pelatihan literasi keuangan digital dengan pendekatan personalisasi bagi bendahara senior dan pejabat baru, termasuk simulasi transaksi langsung, serta mengeluarkan kebijakan lanjutan yang mewajibkan rekanan penyedia barang/jasa menerima pembayaran nontunai disertai sosialisasi intensif kepada pelaku usaha lokal dan penyediaan infrastruktur internet stabil di kantor kecamatan melalui kerja sama dengan penyedia layanan. Bagi Bank Jateng Cabang Wonogiri, diharapkan melakukan penyesuaian teknis aplikasi seperti memperpanjang batas waktu penyelesaian transaksi agar lebih fleksibel mengingat kesibukan pejabat eksekutor, mengembangkan fitur ramah pengguna pedesaan seperti panduan interaktif atau mode offline sementara, serta memperkuat pendampingan on-site di kecamatan terpencil dan kanal komunikasi khusus bendahara. Bendahara kecamatan diharapkan meningkatkan frekuensi penggunaan fitur CMS secara aktif, proaktif berkoordinasi dengan Bank Jateng saat kendala muncul, dan melakukan transfer knowledge kepada pengganti agar kontinuitas kompetensi terjaga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa fokus pada satu kabupaten pedesaan dengan pendekatan kualitatif studi kasus, sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara luas ke daerah perkotaan atau dengan infrastruktur digital lebih baik. Jumlah informan terbatas dan belum melibatkan perspektif Camat sebagai eksekutor, rekanan pihak ketiga, maupun masyarakat pengguna layanan secara langsung, serta dilakukan pada periode tertentu sehingga belum menangkap dinamika jangka panjang pasca-pembaruan fitur atau pelatihan intensif. Untuk penelitian mendatang, disarankan mengembangkan studi dengan variabel tambahan seperti persepsi rekanan

pihak ketiga, ancaman siber, atau perkembangan teknologi terkini, serta menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif pada wilayah yang lebih beragam agar hasil lebih komparatif dan komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alamri, M. S. (2023). Studi Tentang Cash Management System (CMS) Dalam Pembayaran Kompensasi Pegawai Balai Diklat Keagamaan Manado Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 5(1), 20-50.
- Andriany, et al. (2025). Pendekatan Design Thinking dalam Pengembangan Cash Management System untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 945-965. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.626>.
- Anindita, G., & Santoso, F. I. (2022). Implementasi Cash Management System (CMS) dalam Belanja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (NCAF)*, 4(2), 420-425. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art52>.
- Ardunan, Nasution, N., & Seswandi, A. (2026). Pengaruh Pengguna Cash Management System terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Kreasi Ekonomi Nusantara*, 7(1), 34-42.
- Arfi, S. W., & Sandari, T. E. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Cash Management System (CMS) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(3), 64-74.
- Bank Indonesia. (2025a). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Diambil dari: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Bank Indonesia. (2025b). Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP). Diambil dari: <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Bank Jateng. (2025). Bank Jateng Dukung Transformasi Digital Pemkab Wonogiri Lewat Capacity Building. Diambil dari: <https://www.bankjateng.co.id/bank-jateng-dukung-transformasi-digital-pemkab-wonogiri-lewat-capacity-building>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Cahyani, R. M., Prasiliwati, S. L., & Mulyanto, H. (2024). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Efektivitas Cash Management System Terhadap Perilaku Fraud dengan Sikap Profesional sebagai Variabel Intervening dalam Tata Kelola Keuangan Pada ITKJEN KKP. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 2(1), 201-211.
- Center of Economic and Law Studies. (2025). *Indonesia Digital Economy Outlook 2025*. Diambil dari: <https://celios.co.id/digital-economy-outlook-2025/>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Dali, N., Aswati, W. O., & Fiskal. (2023). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Kemudahan Penggunaan E-money terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM: Pendekatan Model TAM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 87-96. <https://doi.org/10.33772/jak.v8i2.99A>.

- Hakim, A. F. (2023). *Implementasi Cash Management System Dalam Pelaksanaan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Puskesmas Karanggayam 1*. Tesis. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Humaira, I., & Hamdani, M. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Nominal*, 7(2), 138-144.
- Kholilah, N., & Iramani, R. (2013). Studi Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi pada Masyarakat Surabaya. *Journal of Business and Banking*, 3(1), 69-80.
- Kuncoro, M. (2015). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawati, A. (2024). *Transformasi Digital Bendahara Daerah: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Buku Manajemen Publik.
- Kurniawati, S. B. (2024). *Peran Literasi Keuangan Digital dalam Transformasi Pengelolaan Keuangan di Era Fintech*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta.
- Liputan6. (2025). Kota Semarang Pertama Kali Raih Dua Penghargaan Tingkat Nasional, Apa Saja?. Diambil dari: <https://www.liputan6.com/regional/read/5741109/kota-semarang-pertama-kali-raih-dua-penghargaan-tingkat-nasional-apa-saja>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2023). The Importance of Financial Literacy: Opening a New Field. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 137-154.
- Melavanic, et al. (2024). Implementasi Kebijakan Transaksi Cash Manajemen System (CMS) Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya). *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 10(1), 111-119.
- Nugraha, S. (2025). Efektivitas Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Cash Management System pada Pemerintah Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah. Tesis. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Diambil dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pongtuluran, V. M., Saerang, D., & Latjandu, L. D. (2025). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Menggunakan Cash Management System (CMS) di Universitas Kristen Indonesia Toraja. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(10), 2902-2912.

- Puspitasari, D. M. (2025). Analisis Implementasi Cash Management System pada Pengelolaan Penerimaan Proyek Divisi Property Management Perum Perumnas. Skripsi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pradana, M. (2020). *Ekonomi Digital dan Inovasi Fintech di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, I., & Sari, R. (2024). Faktor Penghambat Adopsi CMS di Pemprov Jateng. *Jurnal Keuangan Daerah*, 15(2).
- Rahayu, I. (2022). Keamanan Data dan Literasi Keuangan Digital dalam Era Big Data. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(1).
- Rahman, R. A., Daga, R., & Anshar, M. A. (2024). Analisis Penerapan Strategi Marketing Layanan Cash Management System Pada PT. Bank Sulselbar. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 3(1), 65-72. <https://doi.org/10.56858/jsmn.v3i1.261>.
- Ramadhan, I. F. (2023). Pengaruh Cash Management System (CMS) Bank BJB terhadap Good Governance pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tesis. STIE Ekuitas, Bandung.
- Rauf, A. (2023). Cash Management System (CMS) Pada Pengelolaan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dalam Perspektif Islam. Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Rohali, A. W., & Ratnawati, D. (2024). Pengelolaan Petty Cash guna Menunjang Efektivitas Operasional pada PT. QWY. *Economic Reviews Journal*, 3(4), 1340-1344. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.450>.
- Safadila, P. (2024). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Menggunakan Cash Management System (CMS) di KPU Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember.
- Sakti, D. A. P., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Analisis Implementasi Cashless Society Dalam Tata Kelola Keuangan Studi Kasus di Badan Kepegawaian Negara. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 6(5), 2377-2385. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5>.
- Sari, I. (2020). Analisis Penerapan Cash Management System dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di PIK Pulogadung. *Jurnal Perspektif*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.31294/jp.v18i1.6699>.
- Setiawan, A., & Lestari, D. (2024). Peran Literasi Keuangan Digital terhadap SIPD. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1).
- Setiawan, D. (2020). *Literasi Finansial di Era Digital: Tantangan bagi Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sina, P. S. (2020). *Literasi Keuangan: Langkah Menuju Kesejahteraan*. Bogor: In Media.
- Solihat, et al. (2024). Improving a Simple Financial Management System for MSMEs in the Digital Era. *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, 5(2), 223-229. <https://doi.org/10.35899/ijce.v5i03.1019>.

- Syam, et al. (2024). Sustainability in Financial: Cash Management Student in Preventing Financial Distress. *Celebes Journal of Community Services*, 3(2), 327-337.
- Thamrin, M. H., Yamin, A., & Rodianto. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi Cash Management System terhadap Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 6(12), 9915-9924. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3319>.
- Widyastuti, A. (2024). Determinan Minat Penggunaan Cash Management System Instansi Pemerintah dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi. Tesis. Universitas Brawijaya, Malang.
- Wijaya, R., & Santoso, B. (2023). Implementasi CMS pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3).
- Yushita, L. E. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal*, 6(1).
- Zein, R. (2025). Analisis Efektivitas Aplikasi Cash Management System (CMS) KCPSY Bank Sumut Syariah Multatuli (Studi Bank Sumut Syariah Multatuli). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4005-4018.